

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 13 Nomor 1, Juni 2016

PENGARUH LIPUTAN MEDIA, KEPEKAAN INDUSTRI, DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN
(The Effect of Media Coverage, Industry Sensitivity and Corporate Governance Structure on Environmental Disclosure Quality)

Badingatus Solikhah
Universitas Negeri Semarang
badingatusbety@mail.unnes.ac.id

Arga Mustika Winarsih
Universitas Negeri Semarang
argamustika93@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine the influence of media coverage, industry sensitivity and corporate governance structure on the quality of environmental disclosure. The sample of this study is taken from six industries (mining, energy, chemicals, pharmaceuticals, cosmetics, food and beverages) from Indonesia Stock Exchange during 2011, 2012 and 2013. This study uses panel data regression analysis and employs 128 listed companies as the samples of the study. The results show that industry sensitivity, multiple directorship, board size, firm size and ROA positively affect the quality of environmental disclosure. The results also show a negative effect of independent commissionaire on environmental disclosure. This study also provides evidence that media, gender and institutional ownership have no effect on environmental disclosure.

Keywords: media, industry sensitivity, corporate governance, environmental disclosure, fixed effect model

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sampel penelitian ini diambil dari enam industri (pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011, 2012, dan 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji sampel penelitian, yaitu sebanyak 128 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepekaan industri, *multiple directorship*, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan ROA berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh negatif dari komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa liputan media, keragaman *gender*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Kata kunci: liputan media, kepekaan industri, tata kelola perusahaan, pengungkapan lingkungan, model efek tetap

PENDAHULUAN

Pedoman pengungkapan lingkungan yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) mengungkapkan bahwa perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga membantu dalam memecahkan permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan sosial, lingkungan, dan ekonomi (GRI 2006). Permasalahan tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif yaitu perusahaan tambang dan sawit dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologis (Pahlevi 2014).

Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI 2014) menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Korporasi menempati angka yang tertinggi sebagai aktor atau pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan (WALHI 2014). Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia.

Berbagai regulasi mengenai peraturan dan pedoman tentang lingkungan sudah banyak diterapkan di berbagai negara, diantaranya adalah: a) Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat menerbitkan persyaratan yang berkaitan dengan risiko bisnis dan perubahan iklim (SEC 2010); b) Global Reporting Initiative (GRI) mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan (GRI 2006) yang telah digunakan oleh banyak perusahaan di dunia; c) International Organization for Standardization (ISO) menetapkan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan (ISO 2015); serta d) United States Environmental Protection Agency (US EPA) mengeluarkan data Toxics Release Inventory (TRI) (EPA

2013). Berbagai peraturan dan pedoman tersebut mendorong banyak perusahaan di dunia berkeinginan untuk mengungkapkan informasi lingkungannya dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan.

Peraturan tentang lingkungan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Pasal 66 ayat 2c mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Dengan demikian, perusahaan atau perseroan di bidang sumber daya alam harus melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan, dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan.

Pengungkapan informasi lingkungan memberikan beberapa keuntungan kepada berbagai pihak, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan pemangku kepentingan (Pflieger et al. 2005 dalam Suhardjanto 2010). Perusahaan yang memberikan lebih banyak informasi lingkungan akan memberikan citra positif di mata masyarakat. Dengan mengungkapkan informasi lingkungan, perusahaan akan berkontribusi positif dalam kelangsungan hidup manusia dan lingkungan.

Pengungkapan dan pelaporan lingkungan di Amerika Serikat sebagian besar ditujukan kepada *board of director* dan *shareholder* (Millstein 1991 dalam Rupley et al. 2012). Dalam *two tier board system*, *board of director* dibagi menjadi dua badan yang terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Negara-negara dengan *two tier system* antara lain Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang (Saptono 2014). Termasuk Indonesia dalam hal ini menganut *two tier board system* karena sistem hukum

Indonesia yang berasal dari sistem hukum Belanda. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai dua badan yang terpisah, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi.

Dewan komisaris merupakan salah satu organ khusus yang terdapat dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas direksi. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat dua sisi kepentingan yang berbeda yaitu pihak agen (manajemen) dan pihak prinsipal (pemegang saham) (Jensen dan Meckling 1976). Untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap dua kepentingan tersebut, salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dimana di dalamnya terdapat *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.

Ashforth dan Gibbs (1990) dalam Rupley et al. (2012) menyatakan bahwa teori legitimasi akan menyampaikan informasi perusahaan kepada berbagai pihak agar sesuai dengan harapan masyarakat (*stakeholder*). Dalam rangka mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan, perusahaan melakukan pengungkapan. Pengungkapan ini dapat dipublikasikan melalui media. Penggunaan media akan mempermudah masyarakat agar lebih fleksibel untuk mengetahui informasi perusahaan, baik informasi finansial maupun nonfinansial. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu informasi tentang lingkungan karena informasi lingkungan memiliki potensi dan berhubungan langsung dengan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.

Utomo (2000) menyatakan bahwa para peneliti akuntansi sosial tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri, yaitu industri yang *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang tergolong dalam industri *high profile*

tersebut pada umumnya memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi (Zuhroh dan Sukmawati 2003). Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high profile* merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang tinggi, atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert 1992 dalam Utomo 2000). Sementara itu, perusahaan *low profile* adalah sebaliknya.

Penelitian Reverte (2009) pada 46 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Spanyol menggunakan tujuh variabel yaitu, ukuran perusahaan, kepekaan industri, profitabilitas perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan, *media exposure*, *international listing*, dan *leverage*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepekaan industri, dan *media exposure* berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR perusahaan, sementara variabel lain yaitu profitabilitas perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan, *international listing*, dan *leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang menghubungkan variabel kepekaan industri/tipe industri, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, serta kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Sembiring (2005), Anggraini (2006), Djakman dan Machmud (2008), Purwanto (2011), serta Rao et al. (2011) menemukan bahwa tipe industri/profil perusahaan/kepekaan industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hasil tersebut berkebalikan dengan temuan Freedman dan Jaggi (1988) serta Sari (2012). Variabel mekanisme *good corporate governance* seperti ukuran dewan komisaris dan komisaris independen juga menunjukkan hasil yang beragam sebagaimana terdapat dalam penelitian Suhardjanto (2010), Rao et al. (2011), Effendi et al. (2012), dan Rupley et

al. (2012). Sitepu dan Siregar (2008) serta Rao et al. (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR, sementara Suhardjanto (2010) dan Efendy et al. (2012) menemukan sebaliknya.

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti Utomo (2000), Sembiring (2005), Anggraini (2006), Djakman dan Machmud (2008), Ratnasari (2011), Effendi et al. (2012), serta Sari (2012), masih sebatas menghubungkan variabel karakteristik perusahaan serta mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, penelitian ini telah memasukkan variabel liputan media yang diukur berdasarkan Janis-Fadner *coefficient* ke dalam model penelitian. Di negara maju seperti Amerika Serikat, penyebaran informasi melalui media *online* sudah sejak lama dilakukan. Dalam dekade belakangan ini, hal serupa juga terjadi di Indonesia, dimana penyebaran informasi melalui media *online* secara cepat dapat diketahui/diakses masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran variabel liputan media dalam penelitian ini diyakini mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan *environmental disclosure index scorecard* untuk mengukur variabel pengungkapan lingkungan. Pengukuran ini dipandang lebih menunjukkan kualitas pengungkapan lingkungan daripada menggunakan pengukuran secara *dummy* karena pengukuran kualitas pengungkapan lingkungan didasarkan pada strategi manajemen lingkungan yang diterapkan perusahaan. *Index Scorecard* yang dimaksud adalah dengan membagi empat kategori yang digunakan dalam mengukur variabel dependen, yaitu: 1) *compliance* (kepatuhan), yang menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan; 2) *pollution prevention* (pencegahan polusi), menunjukkan tingkat pencegahan polusi perusahaan terhadap lingkungan; 3) *product stewardship* (penanganan produk), dimana

perusahaan mulai melakukan pengawasan terhadap produk mulai dari menggunakan bahan-bahan produk yang ramah lingkungan sampai adanya proses daur ulang atas produk yang telah diproduksi; serta 4) *sustainable development* (pengembangan berkelanjutan), merupakan kategori paling baik, dimana pada tahap ini perusahaan telah melakukan ketiga kategori sebelumnya dan sudah melakukan tanggung jawab lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Variabel struktur tata kelola perusahaan terdiri atas karakteristik dewan komisaris dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini, digunakan variabel kontrol ukuran perusahaan (*firm size*) dan profitabilitas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait pelaporan tanggung jawab sosial dalam konteks Indonesia yang dilakukan oleh Anggraini (2006), Djakman dan Machmud (2008), Ratnasari (2011), Effendi et al. (2012), Sari (2012), Prawindani et al. (2013); maupun Sudarno (2013), dimana penelitian tersebut menggunakan pengukuran pengungkapan lingkungan dengan index Global Reporting Initiative (GRI). Dalam penelitian ini, pengungkapan lingkungan diukur dengan *index scorecard* yang digunakan oleh Rupley et al. (2012) dimana kualitas pengungkapan lingkungan digolongkan dalam empat kategori yaitu *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, serta *sustainable development*. Pengukuran *index scorecard* tersebut merupakan alternatif baru yang belum digunakan oleh peneliti di Indonesia. Penelitian sebelumnya, seperti Utomo (2000), Sembiring (2005), Anggraini (2006), Djakman dan Machmud (2008), Ratnasari (2011), Rao et al. (2011), Effendi et al. (2012), Sari (2012), serta Rupley et al. (2012) dianalisis menggunakan metode OLS, sedangkan dalam penelitian ini dengan regresi data panel. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan variasi

baru dalam pengukuran kualitas pengungkapan lingkungan serta metode analisisnya. Di samping itu, penelitian terdahulu di Indonesia belum mempertimbangkan variabel media dan karakteristik dewan komisaris sehingga kehadiran variabel tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas riset mengenai determinan kualitas pengungkapan lingkungan melalui pengembangan model yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dengan memperkuat sintesis bahwa liputan media, kepekaan industri, serta penerapan tata kelola yang baik merupakan faktor yang memengaruhi kualitas pengungkapan kinerja lingkungan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya (Deegan 2002). Perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Brown dan Deegan 1999). Lindblom (1994) menyatakan bahwa legitimasi bersifat dinamis. Oleh karena itu, *legitimacy gap* akan berubah-ubah tanpa perubahan apapun dalam setiap tindakan perusahaan.

Legitimasi sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui berbagai tindakan, termasuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada *stakeholder* (Deegan 2002). Teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif terkait pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan

menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Brown dan Deegan 1999).

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling 1976). Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya asimetri informasi, manajer sebagai agen akan memilih kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan para prinsipal yaitu para pemilik perusahaan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Dengan adanya dua kepentingan ini, hal ini mengindikasikan manajer bertindak semaunya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan pihak prinsipal. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa penelitian menyatakan teori keagenan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengungkapan. Ball (2006) menyatakan bahwa peningkatan transparansi dan pengungkapan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Corporate governance merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep *corporate governance*, pihak manajemen (agen) diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan pemilik (prinsipal), dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan.

Pengaruh Keberadaan Liputan Media terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan

sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Penelitian Ashforth dan Gibbs (1990) dalam Rupley et al. (2012) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya melakukan komunikasi dengan para *stakeholder*. Keberadaan liputan media tentang lingkungan merupakan atribut eksternal perusahaan yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap komitmen perusahaan terhadap lingkungannya. Liputan media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Oleh karena itu, liputan media akan membentuk legitimasi pemangku kepentingan.

Beberapa hasil penelitian yang melihat pengaruh liputan media terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan dukungan tentang logika di atas. Penelitian Brosius dan Keplinger (1990) dalam Deegan et al. (2002) menunjukkan bahwa intensitas liputan media tentang isu-isu tertentu memengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian Rupley et al. (2012) juga menunjukkan adanya hubungan positif liputan media tentang lingkungan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan serta legitimasi dari masyarakat, perusahaan senantiasa berusaha dalam menjaga reputasinya. Dengan demikian, liputan media dapat membentuk kesadaran masyarakat terkait isu-isu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Kepekaan Industri terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Adam et al. (2005) memaparkan bahwa kepekaan industri merupakan dampak dan pengaruh yang diciptakan perusahaan yang berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha dan karyawan terhadap lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, jenis industri yang berbeda akan memiliki tingkat kepekaan yang berbeda pula karena dampak yang ditimbulkan

oleh masing-masing industri tidaklah sama. Aktivitas industri yang berpotensi lebih besar terhadap kerusakan lingkungan biasanya akan mendapatkan sorotan yang lebih dari masyarakat maupun aktivis lingkungan. Di Indonesia, perusahaan tambang merupakan industri dengan tingkat kepekaan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan industri lain, seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, energi, kimia, maupun industri farmasi (Prasetyanti 2014).

Pada umumnya, perusahaan tambang merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya berpotensi besar terhadap kerusakan alam. Apabila dikaitkan dengan teori legitimasi, perusahaan tambang cenderung akan mengungkapkan kinerja lingkungannya dengan lebih baik untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan (Sari 2012).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan para *stakeholder* akan lebih banyak mengungkapkan informasi lingkungan. Hal ini dilakukan perusahaan agar mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* demi keberlangsungan usahanya. Pada umumnya, perusahaan dengan tingkat kepekaan industri yang tinggi terhadap lingkungan akan memperoleh perhatian yang tinggi pula dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi memengaruhi alam. Penelitian yang dilakukan Anggraini (2006) menggambarkan perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas industri tinggi akan memperoleh perhatian yang lebih dari masyarakat dan kepentingan lain karena aktivitas industri yang berpotensi memengaruhi kepentingan luas, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hasil penelitian Zulaikha dan Setyawan (2012) menyatakan bahwa sensitivitas industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki kepekaan tinggi (contoh perusahaan tambang) mempunyai dampak potensi yang lebih tinggi dalam memengaruhi kondisi

serta keberadaan lingkungan. Perusahaan yang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat dimungkinkan akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya.

Karakteristik Dewan Komisaris

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Maksud dari pihak tidak terafiliasi adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang dalam pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Melalui perannya dalam fungsi pengawasan, dewan komisaris akan memantau manajemen agar keputusan yang diambil tidak merugikan para pemangku kepentingan. Mizruchi (1983) mengemukakan bahwa efektivitas penyeimbangan kekuatan manajer dan dewan komisaris dipengaruhi independensi dewan komisaris itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen harus bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Muktiyanto (2011) berpendapat bahwa komisaris independen mampu mendorong manajemen untuk mengambil keputusan strategis untuk mencapai kinerja yang optimal. Hal ini termasuk dalam melakukan pengawasan atas pelaporan pengungkapan lingkungan karena semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin mendukung pula prinsip responsibilitas dalam penerapan *corporate governance* bagi perusahaan terhadap pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Rosenstein dan Wyatt 1990; Prasetyanti 2014).

Penelitian Chen dan Jaggi (2000) menyatakan bahwa proporsi komisaris

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini juga konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) yang menunjukkan hubungan yang positif antara independensi dewan komisaris dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{3a}: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Keragaman Gender terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Menurut Adams et al. (2005), komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka. Penelitian Rao et al. (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dewan komisaris perempuan terhadap pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris perempuan mempunyai keterlibatan aktif, persiapan yang lebih baik, kemandirian, dan kualitas lainnya yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan lingkungan (Rao et al. 2011).

Huse dan Solberg (2006) dalam Rao et al. (2011) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan, dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan komisaris. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Adams et al. (2005) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan bahwa perempuan memiliki kehadiran atau partisipasi yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap dewan komisaris. Jika perempuan berpengaruh terhadap dewan komisaris, maka akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dewan komisaris perempuan terhadap pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris perempuan yang mempunyai beberapa sifat di atas memungkinkan untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{3b}: Keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Multiple Directorships terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Multiple-directorship merupakan anggota dewan komisaris yang bekerja sebagai dewan komisaris di perusahaan lain yang mendapatkan pengetahuan serta interaksi berbagai dewan komisaris. Berkaitan dengan pengungkapan lingkungan, perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang bekerja di beberapa perusahaan akan memiliki kualitas pengungkapan lingkungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota dewan komisaris yang hanya bekerja di satu perusahaan. Hal tersebut karena anggota dewan komisaris telah memiliki pengalaman dalam pengawasan pelaporan lingkungan di perusahaan-perusahaan lain dimana mereka bekerja Rupley et al. (2012). Hal ini juga didukung oleh penelitian Fama dan Jensen (1983) bahwa dewan komisaris akan menunjukkan keahliannya dengan bekerja di perusahaan lain.

Penelitian Rupley et al. (2012) menunjukkan adanya pengaruh antara *multiple-directorship* terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris yang mempunyai pekerjaan di perusahaan lain atau dengan kata lain mempunyai pekerjaan lebih dari satu akan membawa dampak positif bagi perusahaan karena dewan komisaris akan melakukan pengawasan secara maksimal demi kepentingan *pemangku kepentingan*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{3c}: Multiple directorships berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

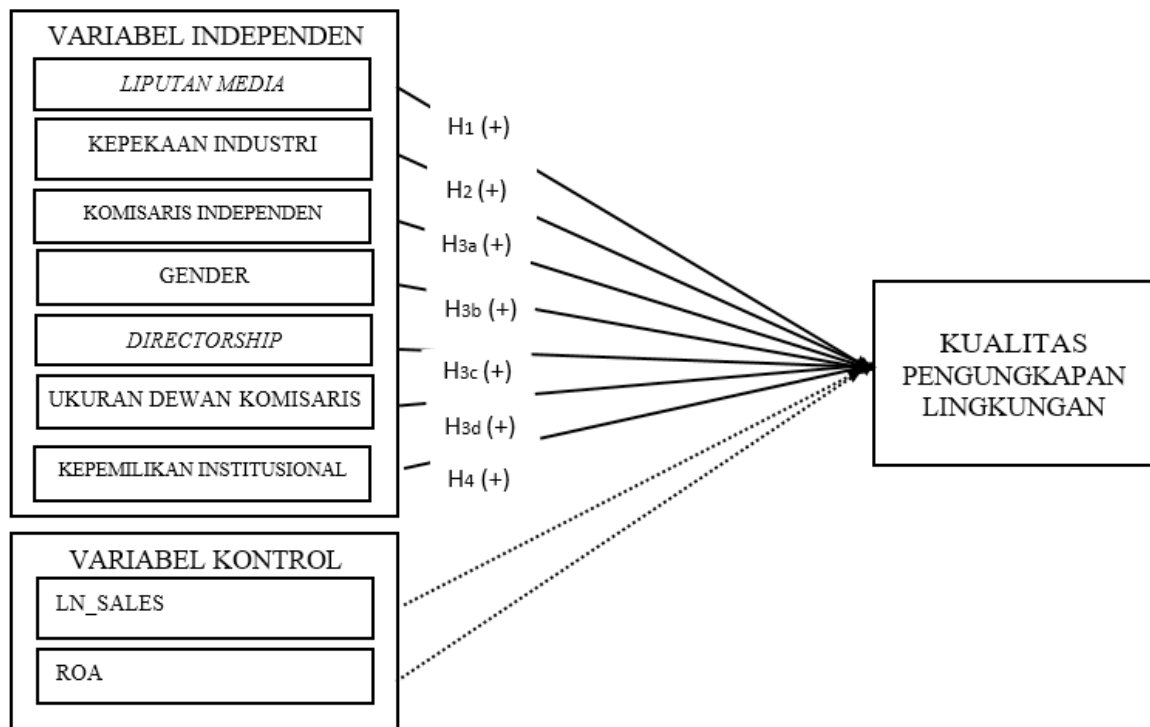
Inti dari tata kelola perusahaan di Indonesia ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Muntoro 2006). Teori agensi juga menyatakan bahwa dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring 2005). Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan lingkungan juga akan semakin berkualitas karena terdapat sistem pengawasan dan monitoring yang baik dari perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Sitepu dan Siregar (2008), serta Rao et al. (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen guna mengungkapkan informasi yang luas. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{3d}: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Teori agensi memunculkan pendapat tentang adanya perbedaan kepentingan antar pemilik, yaitu pemegang saham dengan manajer. Perbedaan kepentingan ini



Gambar 1
Rerangka Penelitian

dapat diminimalkan dengan suatu sistem pengawasan yang dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua pihak tersebut. Namun, proses pengawasan menyebabkan timbulnya biaya yaitu biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional (Mursalim 2007). Kepemilikan saham institusional mampu memperkuat bahkan menggantikan peran dewan dalam memonitor kinerja perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat dijadikan upaya mengurangi masalah agensi melalui monitoring. Investor institusional merupakan salah satu jenis kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mudah memengaruhi nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Rao et al. 2011). Hal ini menunjukkan dengan semakin besar kepemilikan institusi yang dimiliki, perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rerangka dari penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) yang dilambangkan dengan ED. ED merupakan informasi yang diungkapkan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Informasi lingkungan perusahaan tersebut dapat diperoleh dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengukuran ED menggunakan indeks berdasarkan Rupley et al. (2012) yaitu menggunakan *environmental disclosure index scorecard* yang disajikan dalam Lampiran 1. *Environmental disclosure index scorecard* ini terdiri dari 60

item pengukuran untuk mengukur kualitas *environmental disclosure* perusahaan, dengan membagi 4 tingkatan kelompok strategi yaitu *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari liputan media, kepekaan industri, karakteristik dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. Karakteristik dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita, dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu (*multiple directorship*), dan ukuran dewan komisaris (*board size*). Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel independen terdapat dalam Lampiran 1.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah merepresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley et al. (2012) dan Prasetianti (2014), terdiri atas enam jenis industri yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data (Rupley et al. 2012) karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode

purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (lihat Tabel 1).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan dan laporan tanggung jawab sosial melalui website resmi BEI (www.idx.co.id) dan data pendukung dari *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)* serta sumber data dari surat kabar nasional yang dipublikasikan secara *online*, yaitu media Kompas, Antara News, Kontan, WALHI Nasional, dan liputan media yang berasal dari *website* perusahaan itu sendiri.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan EVIEWS 8.0. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Selanjutnya, dilakukan pemilihan atas model terbaik dengan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier (LM)*. Uji prasyarat regresi terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 1
Pemihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman di BEI tahun 2011-2013	70
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan <i>corporate social responsibility</i> baik dalam <i>annual report</i> maupun <i>sustainability report</i>	(20)
3	Perusahaan yang memenuhi kriteria	50
4	Jumlah sampel 2011-2013 (3 x 50)	150
5	Data Outlier ^{*)}	22
6	Total Sampel	128

^{*)} Berdasarkan uji z-score yang memiliki nilai z antara 3 s.d. 4 (Hair 1998)

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-Rata	Simpangan Baku
Kualitas Pengungkapan Lingkungan (DQ_QUALITY)	128	0,20	0,97	0,4969	0,18102
Liputan Media (MEDIA)	128	-4,29	3,00	0,6357	1,19020
Kepekaan Industri (SEN_IND)	128	0,00	1,00	0,3488	0,47846
Komisaris Independen (IND)	128	0,25	0,57	0,3795	0,07480
Komisaris Perempuan (GENDER)	128	0,00	0,75	0,0945	0,18844
DIRECTORSHIP	128	0,00	1,00	0,6846	0,28240
Board Size (BS)	128	2,00	13,00	5,0078	1,95455
Kepemilikan Institusional (KI)	128	0,00	0,56	0,2835	0,17244
Firm Size (LN_SALES)	128	20,62	31,69	28,4353	1,98976
Profitabilitas (ROA)	128	-0,24	0,66	0,0917	0,14012

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DQ_QUALITY_{it} = \alpha + \beta_1 MEDIA_{it} + \beta_2 SEN_IND_{it} + \beta_3 IND_{it} + \beta_4 GENDER_{it} + \beta_5 DIRECTORSHIP_{it} + \beta_6 BS_{it} + \beta_7 KI_{it} + \beta_8 Ln_SALES_{it} + \beta_9 ROA_{it} + e$$

- DQ_QUALITY_{it} : Skor kualitas pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*)
- MEDIA_{it} : Keberadaan liputan media
- SEN_IND_{it} : Kepekaan industri (*dummy variable*)
- IND_{it} : Proporsi komisaris independen
- GENDER_{it} : Proporsi komisaris perempuan
- DIRECTORSHIP_{it} : Proporsi komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu
- BS_{it} : Jumlah anggota dewan komisaris (*board size*)
- KI_{it} : Proporsi kepemilikan saham institusi (kepemilikan institusional)

- Ln_SALES_{it} : Logaritma natural total penjualan
- ROA_{it} : *Return on asset*
- α : Konstanta (*intercept*)
- $\beta_1 - \beta_{10}$: Koefisien regresi
- e : *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menghasilkan data mengenai gambaran variabel-variabel yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yang diolah sebanyak 129 data selama 3 tahun penelitian dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat variasi kualitas pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia belum ada pedoman yang pasti untuk melaporkan kinerja lingkungan perusahaan. Meskipun sudah terdapat pedoman pelaporan kinerja lingkungan yang diterbitkan oleh GRI, tetapi masih banyak perusahaan yang melaporkan kinerja lingkungannya berbeda-

Tabel 3
Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Redundant Fixed Effects Tests			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.277985	(47,54)	0.0000
Cross-section Chi-square	367.416778	47	0.0000
Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.590921	8	0.0004

beda dengan menyesuaikan kompleksitas masing-masing perusahaan. Hasil perhitungan kualitas pengungkapan lingkungan terhadap 50 perusahaan yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa perusahaan yang telah mengungkapkan kinerja lingkungannya berdasarkan indikator kualitas pengungkapan lingkungan menurut Rupley et al. (2012) baru sebanyak 49%. Perusahaan yang memiliki kualitas pengungkapan lingkungan tertinggi yaitu sebesar 97% adalah PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2013.

Variabel independen liputan media diukur menggunakan koefisien Janis-Fadner dengan menjumlahkan total artikel positif, total artikel negatif, dan total artikel netral. Variabel liputan media mempunyai nilai terendah sebesar -4,29 pada PT Leyand Internasional Tbk tahun 2013. Artinya, berita mengenai lingkungan pada PT Leyand Internasional Tbk yang dimuat dimedia lebih banyak berita negatif. Nilai tertinggi sebesar 3,00 terjadi pada 6 perusahaan sampel pada tahun yang berbeda. Variabel kepemilikan

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MEDIA	0.673269	0.412294	1.632981	0.1083
SEN_IND	3.383586	1.740775	1.943724	0.0547
INDEP	-0.247778	1.040352	-0.238167	0.0812
GENDER	1.489941	1.105132	1.348201	0.1832
DIRECTORSHIP	0.357453	0.361214	0.989588	0.0368
BS	1.515867	0.611759	-2.477881	0.0164
KI	0.996322	1.130036	0.881673	0.7385
LN_SALES	0.231681	0.155572	1.489220	0.0142
ROA	1.955618	2.276481	-0.859053	0.0394
C	-580.6404	412.5513	-1.407438	0.1650
R-squared	0.675850	Mean dependent var		0.496918
Adjusted R-squared	0.651252	S.D. dependent var		0.181017
S.E. of regression	2.213988	Akaike info criterion		4.734153
Sum squared resid	264.6940	Schwarz criterion		6.108943
Log likelihood	-204.3784	Hannan-Quinn criter.		5.291775
F-statistic	39.67235	Durbin-Watson stat		2.790993
Prob(F-statistic)	0.000000			

institusional (KI) menunjukkan bahwa untuk saham perusahaan sampel, rata-rata 28% dimiliki oleh perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi.

Pemilihan Model Terbaik

Uji *Chow* dan uji *Hausman* pada Tabel 3 digunakan untuk menentukan model mana yang paling tepat di antara *common effect model*, *fixed effect model*, maupun *random effect model*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik pada uji *Chow* maupun uji *Hausman* nilai probabilitas di bawah alfa 5% sehingga dapat ditentukan bahwa model yang dipilih adalah *fixed effect model* tanpa harus melakukan uji *Langrangge Multiplier* (LM).

Hasil Uji Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel *multiple directorship*, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan pada $\alpha = 5\%$, sementara variabel kepekaan industri dan dewan komisaris independen berpengaruh pada $\alpha = 10\%$. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman *gender*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil tersebut belum mempertimbangkan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan hipotesis yang dikembangkan, maka hasil penelitian tampak dalam Tabel 5.

Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R square* pada model regresi *DQ_QUALITY* adalah sebesar 0,651252. Hal ini berarti 65,13% kualitas pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh sembilan variabel independen yaitu keberadaan liputan media, kepekaan industri, dewan komisaris independen, keragaman anggota dewan komisaris, dewan komisaris yang mempunyai pekerjaan lebih dari satu, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sementara itu, sisanya yaitu 34,87% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian.

Pengaruh Liputan Media terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keberadaan liputan media (H_1) ditolak. Variabel *environmental media* yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Media yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada media Kompas, Antara News, Kontan, WALHI Nasional dan *website* perusahaan. Di samping itu, kecenderungan insan media dalam membuat liputan cenderung memublikasikan isu-isu besar saja karena anggapan bahwa isu-isu kecil kurang menjadi perhatian

Tabel 5
Ringkasan Hasil Uji Regresi

Variabel Independen	Arah Hipotesis	Arah Hasil	Signifikan	Keterangan
MEDIA	+	+	x	H_1 Ditolak
SEN_IND	+	+	$\sqrt{(10\%)}$	H_2 Diterima
IND	+	-	$\sqrt{(10\%)}$	H_{3a} Ditolak
GENDER	+	+	x	H_{3b} Ditolak
DIRECTORSHIP	+	+	$\sqrt{(5\%)}$	H_{3c} Diterima
BS	+	+	$\sqrt{(5\%)}$	H_{3d} Diterima
KI	+	+	x	H_4 Ditolak
Ln_SALES	+	+	$\sqrt{(5\%)}$	Kontrol
ROA	+	+	$\sqrt{(5\%)}$	Kontrol

masyarakat Deegan et al. (2002). Selain itu, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini tidak semuanya memublikasikan informasi mengenai lingkungan dalam liputan media.

Temuan ini senada dengan hasil penelitian Brown dan Deegan (1999) yang menemukan bahwa pada beberapa industri, *environmental disclosure* tidak dikaitkan dengan liputan media positif maupun negatif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) bahwa media akan menciptakan kesadaran pemangku kepentingan tentang masalah lingkungan perusahaan sehingga manajemen perusahaan merespon dengan menyediakan *environmental disclosure*.

Pengaruh Kepekaan Industri terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri (H_2) diterima pada tingkat $\alpha = 10\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sembiring (2005), Anggraini (2006), Djakman dan Machmud (2008), serta Purwanto (2011) yang menemukan bukti empiris bahwa tipe industri/profil perusahaan/kepekaan industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggungjawaban sosial. Namun, penelitian ini tidak selaras dengan peneliti terdahulu Freedman dan Jaggi (2005) serta Sari (2012).

Kepekaan industri diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana 1 jika perusahaan merupakan perusahaan tambang dan energi dan 0 untuk perusahaan energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Perusahaan tambang merupakan industri yang sensitif (Prasetianti 2014) karena industri tersebut langsung bersinggungan dengan alam. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengkonfirmasi teori legitimasi bahwa perusahaan dengan tingkat kepekaan tinggi akan mengungkapkan kinerja lingkungannya lebih baik dan lebih luas untuk melegitimasi

kegiatan operasinya dan menurunkan tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam model *fixed effect*, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada $\alpha = 10\%$ terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan menunjukkan pola negatif, artinya proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Pola hubungan ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang dikembangkan, dimana sebelumnya diduga bahwa proporsi komisaris independen yang besar akan meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan.

Seharusnya, keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *corporate governance* bagi perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan fenomena yang berbeda. Hal ini dimungkinkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia (Yunita 2008 dalam Suhardjanto 2010). Oleh karena itu, semakin besar jumlah komisaris independen justru semakin tidak efektif dalam memberikan kontrol untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Dengan demikian, proporsi komisaris independen yang semakin besar tidak mampu meningkatkan kualitas pengawasan atas pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan sehingga kualitas pengungkapan lingkungan akan menurun. Pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan juga diduga karena kurang aktifnya keberadaan dewan komisaris independen dalam kegiatan pengawasan perusahaan (Azhar 2014). Semakin banyak jumlah komisaris independen justru dapat mempersulit proses koordinasi sehingga hal ini menyebabkan ketimpangan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suhardjanto (2010) dan Effendi et al. (2012), tetapi tidak sejalan dengan penelitian Rupley et al. (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada model *fixed effect*, variabel keberagaman *gender* yaitu keberadaan anggota dewan komisaris perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya variabel keberagaman *gender* pada model regresi ternyata sejalan dengan penelitian Prasetianti (2014) dimana tanpa adanya anggota dewan komisaris perempuan, perusahaan tetap berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2009) dalam Prawinandi et al. (2013) menyatakan bahwa di Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah) dimana pria dianggap sebagai pemegang kontrol dan pengambil keputusan utama sehingga menyebabkan penelitian ini tidak signifikan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Rupley et al. (2012) dan Rao et al. (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara komisaris perempuan terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

Pengaruh Multiple Directorship terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *multiple directorship* (DIRECTORSHIP), yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) dan Prasetianti (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *multiple directorship* dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Dengan adanya keragaman pekerjaan, hal

ini meningkatkan efektivitas dewan dan nilai pemegang saham. Selain itu, banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang mempunyai pekerjaan di perusahaan lain dan lebih dari satu akan memiliki kualitas pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi karena telah melakukan pelaporan lingkungan di perusahaan-perusahaan lain. Anggota dewan yang bekerja di berbagai perusahaan cenderung memiliki reputasi yang memiliki nilai tambah dari tipe anggota lain (Rupley et al. 2012).

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi bahwa pengawasan dewan komisaris merupakan mekanisme pengelolaan yang baik (Jensen dan Mecking 1976). Selanjutnya, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Dengan besarnya jumlah dewan komisaris, hal ini menyebabkan proses monitoring akan semakin baik sehingga pengungkapan informasi sosial dan lingkungan akan semakin luas dan terjamin keandalannya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rao et al. (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris sebagai puncak akan semakin efektif pula sistem pengelolaan internal perusahaan karena dewan komisaris yang memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan perusahaan baik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Koefisien dari *fixed effect model* menunjukkan angka 0.996322 dan bertanda positif yang menunjukkan arah hubungan positif, sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Ditolaknya hipotesis tersebut (H_4) berarti bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berdampak pada peningkatan kualitas pengungkapan lingkungan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan reksa dana, dana pensiun, asuransi, maupun perusahaan investasi lainnya dengan jumlah kepemilikan saham cukup besar (mayoritas). Beberapa alasan yang dapat digunakan mengapa pemegang saham mayoritas tidak terlalu tertarik terhadap pengungkapan informasi sukarela pada laporan tahunan sebagaimana diperkuat pendapat Nuryaman (2009) adalah sebagai berikut: 1) Pemegang saham mayoritas tidak terlalu tertarik dengan pengungkapan sukarela karena mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan secara langsung ke perusahaan; dan 2) Sebagai strategi dalam persaingan, beberapa informasi penting sengaja ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para pesaing perusahaan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Rao et al. (2011) yang menyatakan bahwa semakin banyak kepemilikan institusional cenderung memberikan tekanan manajemen untuk membatasi pengungkapan kepada publik. Hal tersebut didorong berbagai alasan diantaranya adalah untuk efisiensi sumber daya dan sumber dana. Oleh karena itu, tingginya kepemilikan institusional tidak mampu mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan yang akan dipublikasikan oleh manajemen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sudarno (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan (Firm Size)

Berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan memiliki arah yang positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kualitas pengungkapan lingkungan yang akan dipublikasikan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) dan Suhardjanto (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Menurut Brown dan Deegan (1999), dalam teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti. Pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring 2005).

Profitabilitas (ROA)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai signifikansi $0.0394 < 0.05$ dengan nilai koefisien 1.955618, artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan lingkungan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Hal tersebut mendukung pendapat Hackston dan Milne (1996) bahwa pengungkapan lingkungan dipercaya sebagai pendekatan manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespons kebutuhan sosial.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung premis teori agensi bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka pengungkapan sosial yang diungkapkan akan semakin baik. Perusahaan dengan laba yang semakin tinggi artinya memiliki sumber dana yang besar pula untuk melakukan pengungkapan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Anggraini (2006). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Luthfia (2011) dimana kinerja keuangan perusahaan (ROA) tidak berpengaruh dengan laporan yang dipublikasikan perusahaan secara sukarela.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri, komisaris independen, *multiple directorships*, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman *gender*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan di Indonesia; 2) Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan lingkungan dan mengukur jenis liputan media; 3) Terbatasnya media *online* yang dijadikan sumber dalam mengukur variabel *environmental media*; serta 4) Pengukuran variabel kepemilikan institusi dalam penelitian ini hanya melihat kepemilikan langsung dan mengategorikan kepemilikan oleh *nominees/bank custodian* sebagai investor institusi, hal ini dimungkinkan dapat memengaruhi hasil.

Saran berdasarkan penelitian ini adalah: 1) Menambah sumber media *online* lain yang

memublikasikan pengungkapan lingkungan perusahaan misalnya website IICG (www.iicg.org), Majalah SWA (www.swa.co.id), dan Tempo (www.tempo.co); 2) Menambah sampel pada berbagai sektor industri seperti rokok, minyak dan gas, dan perhutanan sehingga dapat digeneralisir pada semua sektor; 3) Meminimalisasi unsur subjektivitas pengukuran kualitas pengungkapan lingkungan dengan menggunakan skala pembobotan yang lebih variatif untuk setiap item kriteria, misalnya 0 (jika tidak diungkapkan), 1 (jika diungkapkan dalam narasi), dan 2 (jika diungkapkan dalam narasi dan angka); serta 4) Penelusuran kepemilikan institusi dapat mempertimbangkan kepemilikan langsung dan tidak langsung serta tidak menyertakan *nominees* sebagai investor institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. B., H. Almeida, and D. Ferreira. 2005. Powerful CEOs and Their Impact on Corporate Performance. *Review of Financial Studies*, 18 (4), 1403-1432.
- Anggraini, F. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Azhar, A. 2014. Pengaruh Elemen Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1), 54-71.
- Ball, H. 2006. Parent-Infant Bed-Sharing Behavior Effects of Feeding Type and Presence of Father. *Human Nature*, 17 (3), 301-331.
- Brown, N. and C. Deegan. 1999. The Public Disclosure of Environmental Performance Information – A Dual Test of Media Agenda Setting Theory and

- Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, 29 (1), 21-41.
- Chen, C. J. P. and B. Jaggi. 2000. Association between Independent Non-Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19 (4-5), 285-310.
- Deegan, C. 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15 (3), 282-311.
- Deegan, C., R. Michaela, and J. Tobin. 2002. An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure of BHP from 1983-1997. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15 (3), 312-343.
- Dewi, S. S. dan M. P. Priyadi. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2 (3), 1-20.
- Djakman, C. D. dan N. Machmud. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Effendi, B., L. Uzliawati, dan A. S. Yulianto. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Environmental Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2008-2011*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Fama, E. F. and M. C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26 (2), 301-325.
- Freedman, M. and B. Jaggi. 2005. Global Warming, Commitment to the Kyoto Protocol, and Accounting Disclosures by the Largest Global Public Firms from Polluting Industries. *The International Journal of Accounting*, 40 (3), 215-232.
- Global Reporting Initiative. 2006. *Pedoman Laporan Keberlanjutan*. Diunduh tanggal 23 Oktober 2014, <https://www.globalreporting.org/>.
- Hackston, D. and M. Milne. 1996. Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 9 (1), 77-108.
- Hair, J. F. 1998. *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- International Organization for Standardization (ISO). 2015. *ISO 14001:2015 Environmental Management System-Requirements with Guidance for Use*. Diunduh tanggal 15 Februari 2015, <http://www.iso.org/iso/>.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Lindblom, C. K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. Paper presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York.
- Luthfia, K. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2).
- Mizruchi, M. S. 1983. Who Control Whom? An Examination of the Relation between Management and Board of Directors in Large American Corporation. *The Academy of Management Review*, 8 (3), 426-435.
- Muktiyanto, A. 2011. Pengaruh Interdependensi Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8 (2), 197-213.

- Muntoro, R. K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Majalah Usahawan Indonesia*, 11.
- Mursalim. 2007. *Simultanitas Aktivisme Institusional, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Utang dalam Mengurangi Konflik Keagenan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Nuryaman. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6 (1), 89-116.
- Pahlevi, A. 2014. *Dekrit Rakyat Kalbar Untuk Presiden Terpilih*. Diunduh tanggal 7 November 2014, <http://www.mongabay.co.id/tag/tambang/>.
- Prasanti, N. 2014. *Pengaruh Media dan Struktur Corporate Governance terhadap Kualitas Environmental Disclosure*. Diunduh tanggal 20 Desember 2014, <http://eprints.undip.ac.id/42783/1/PRASETIANTI.pdf>.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto, dan H. Triatmoko. 2013. *Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XIII, Manado.
- Purwanto, A. 2011. Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1), 12-29.
- Rao, K. K., C. A. Tilt, and L. H. Lester. 2011. Corporate Governance and Environmental Reporting. An Australian Study. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 12 (2), 143-163.
- Ratnasari, Y. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di dalam Sustainability Report*. Diunduh tanggal 15 November 2015, <http://eprints.undip.ac.id/28629/1/Skripsi13.pdf>.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Reverte, C. 2009. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms. *Journal of Business Ethics*, 88 (2), 351-366.
- Rosenstein, S. and J. G. Wyatt. 1990. Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth. *Journal of Financial Economics*, 26 (2), 175-191.
- Rupley, K. H., D. Brown, and R. S. Marshall. 2012. Governance, Media, and the Quality of Environmental Disclosure. *Journal Accounting Public Policy*, 31 (6), 610-640.
- Saptono, A. 2014. Board – CEO Relationship (One Tier System – Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris – Dewan Direksi (Two Tier System Continental). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 10 (1), 63-75.
- Sari, A. R. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal*, 1 (1), 124-140.
- Sembiring, E. R. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Sitepu, A. C. dan H. S. Siregar. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 19, 1-9.
- Sudarno, 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (1), 1-14.

- Suhardjanto, D. 2010. Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure. *Prestasi*, 6 (1), 39-69.
- Susanti, R. 2014. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 3 (1), 1-18.
- Ujiyantho, A. M. dan B. A. Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2013. *The Toxics Release Inventory in Action: Media, Government, Business, Community and Academic Uses of TRI Data*. Diunduh tanggal 23 Oktober 2014, <https://www.epa.gov/>.
- U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 2010. *SEC Issues Interpretive Guidance on Disclosure Related to Business or Legal Developments Regarding Climate Change*. Diunduh tanggal 22 November 2014, <http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-15.htm>.
- Utomo, M. M. 2000. *Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan antara Perusahaan-Perusahaan High Profile dan Low Profile)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi III, Jakarta.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 2014. *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2014. Politik 2014: Utamakan Keadilan Ekologis*. Diunduh tanggal 7 November 2014, <http://www.walhi.or.id/>.
- Zuhroh, D. dan I. Sukmawati. 2003. *Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan High Profile di BEJ)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- Zulaikha dan B. Setyawan. 2012. Analisis Pengaruh Praktik Good Corporate Governance dan Manajemen Laba terhadap Corporate Environmental Disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 1-13.

Lampiran 1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Literatur
Variabel Dependen <i>Environmental Disclosure Quality</i>			
Kualitas Pengungkapan Lingkungan (<i>Environmental Disclosure</i>) (DQ_QUALITY)	Menjelaskan seluruh strategi (<i>compliance, pollution prevention, product stewardship, dan sustainable development</i>) secara keseluruhan yang diungkapkan perusahaan.	Skor indikator <i>environmental disclosure (compliance, pollution prevention, product stewardship, dan sustainable development)</i> dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>	Rupley et al. (2012)
Variabel Independen			
<i>Enviromental Media</i>			
Liputan Media	<i>Environmental disclosure</i> yang dipublikasikan secara luas oleh perusahaan secara <i>online</i> . Media yang digunakan untuk mengukur proksi ini adalah surat kabar yang dipublikasi secara <i>online</i> , yaitu media Kompas, Antara News, Kontan, WALHI Nasional dan liputan media yang berasal dari <i>website</i> perusahaan itu sendiri.	Janis-Fadner coefficient = $* \frac{(e^2 - ec)}{t^2} \quad \text{if } e > c$ $** \frac{(ec - c^2)}{t^2} \quad \text{if } c > e$ $*** 0 \quad \text{if } e = c$ e adalah jumlah artikel positif tentang lingkungan, c adalah jumlah tentang artikel negatif tentang lingkungan, dan t adalah jumlah e + c.	Janis dan Fadner 1995; Bansal dan Clelland 2004 dalam Rupley et al. (2012)
Janis-Fadner Coefficient	Koefisien Janis-Fadner mengukur jumlah negatif dan positif referensi media dalam media <i>online</i> nasional yang berhubungan dalam isu lingkungan.		
Kepekaan Industri			
Kepekaan Industri (SEN_IND)	Pengaruh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan.	1 jika perusahaan merupakan industri pertambangan dan energi; 0 untuk perusahaan energi, kimia, farmasi, kosmetik serta makanan dan minuman.	Rupley et al. (2012)
Karakteristik Dewan Komisaris			

Variabel	Definisi	Pengukuran	Literatur
Dewan Komisaris Independen (IND)	Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan serta secara independen melakukan pengawasan terhadap perusahaan.	IND = proporsi anggota dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan.	Muktiyanto (2011); Ratnasari (2011)
Keberagaman Gender (GENDER)	Dewan komisaris wanita yang berada di perusahaan.	GENDER = proporsi anggota dewan komisaris perempuan yang dimiliki perusahaan.	Rupley et al. (2012); Prasetianti (2014)
<i>Multiple Directorship</i>	Anggota dewan komisaris yang juga menjabat sebagai dewan komisaris pada perusahaan lain.	DIRECTORSHIP = proporsi anggota dewan komisaris yang menjabat sebagai dewan komisaris pada perusahaan lain.	Rupley et al. (2012); Prawinandi et al. (2013)
<i>Board Size (BS)</i>	Jumlah dewan komisaris yang berada di perusahaan.	BS = jumlah anggota dewan komisaris yang berada di perusahaan.	Effendi et al. (2012); Suhrdjanto (2010); Sitepu dan Siregar (2008); Sembiring (2005)
Ownership			
Kepemilikan Institusional (KI)	Kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga/institusi seperti perusahaan reksa dana, dana pensiun, asuransi, maupun perusahaan investasi lainnya.	$\frac{\text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Ujiyantho dan Pramuka (2007); Rao et al. (2011); Susanti (2014)
Variabel Kontrol			
Ukuran Perusahaan (<i>Firm Size</i>)	Besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aset.	Log Natural dari Total Penjualan (Ln_Sales)	Rupley et al. (2012)
Profitabilitas (ROA)	Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Freedman dan Jaggi (2005); Dewi dan Priyadi (2013)